

Pembahasan

LAPORAN BULAN OKTOBER

Badan Pengarah Papua 2025

TEMA :

Kolaborasi Pembangunan Menuju
Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera

30 SEPTEMBER 2025



Pokja Papua Produktif Mewakili pokja papua cerdas



Pengukuhan Bunda Paud Provinsi Papua Tengah dan 8 Kabupaten di Papua Tengah

- Pada tanggal 2 Oktober 2025, Nurhaidah Nawipa dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah bersamaan dengan pengukuhan Bunda PAUD dari 8 kabupaten di provinsi tersebut. Acara pengukuhan ini berlangsung di Guest House, Nabire.
- Pengukuhan ini menandai langkah strategis dalam memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di Papua Tengah. Bunda PAUD memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak, memastikan mereka mendapatkan pendidikan dan perhatian yang dibutuhkan untuk menjadi generasi emas di masa depan.
- Nurhaidah Nawipa menekankan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kebersamaan dalam menjalankan amanah sebagai Bunda PAUD. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan OPD atas dukungan mereka terhadap program-program PAUD, serta mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak-anak.
- Salah satu Bunda PAUD kabupaten yang dikukuhkan adalah Ursula Wonda dari Kabupaten Puncak Jaya. Gubernur Papua Tengah juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari mitra internasional, termasuk pemerintah Australia, dalam pembangunan pendidikan di provinsi tersebut.

02 Oktober 2025

Anggota BPP & (Papua Ceerdas)

Terdapat 5 point yang menjadi Kesimpulan rapat bersama tim penkaji pendidikan KPG.

SMA tambah keguruan berasrama (berasal dari daerah terseleksi secara psikologi/bakat/minat/komitmen/asal daerah/pengentasan anak tidak sekolah.

Yang secara otomatis masuk LPTK (PGSD dan / keguruan bidang studi.

Berlanjut sertifikasi/ppg, sertifikasi pra-jabatan

Beasiswa dari pemerintah daerah sepenuhnya,

Sekolah berpola asrama dikelola oleh tim khusus

Rapat SHEK Anggota BPP dan tim penkaji pendidikan KPG



04 Oktober 2025

Rapat bersama inspektorat kementerian dalam Negeri, 8 Oktober 2025



Hasil rapat

Perlu ada sinkronisasi HTCK antar pengemban dan pengelola dana Otsus

.keterlibatan BP3OKP musrembang otsus ada dasarnya dan akan di akomodasi ke bagian yg membidangi permasalahan tersebut di kemendagri

keterlibatan BP3OKP musrembang otsus ada dasarnya dan akan di akomodasi ke bagian yg membidangi permasalahan tersebut di kemendagri

makd.perlu adakan rapat konsolidasi atara pengelola dana otsus dan pengawasa serta badan badan otsus lainnya



- A. MEMINTA REALISASI ANGGARAN KEPADA PEMDA PROV/KAB.
- B. RAKOR BADAN PENGELOLA DANA OTSUS DAN PENGAWASAN SERTA BADAN BADAN OTSUS LAINNYA..
- C. APA BILA DRI KOORDINASI DENGAN PEMDA SETEMPAT MENDAPAT JALAN BUNTU MAKA BP3OP MELAPORKAN KEPADA GUBERNUR,BUPATI SESUAI AMANAT UU NO.12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN SE NO.100.24/3207/SJ/(SE NO.3 TAHUN 2025 KEPADA ITJEN KEMENDAGRI.

- A. INSPEKTUR JENDERAL PENGAWASAN KEMENDAGRI , KOMJEN POL DRS. SANG MADE MAHENDRA JAYA,SH,MH.
- B. BRIGJEN POL HARUN YUNI, SH, SIK.MSI (INSPEKTUR 1 KEMENDAGRI).
- C. INSPEKTUR 2 KEMENDAGRI (DRS. ANDI BATARLIFU MSI.)



- A. KEPALA BP3OKP PROV PT (IRJEN POL (P) DRS. PIETRUS W)
- B. POKJA POLHUKAM (KBP (P) B. MATURBONGS)
- C. POKJA PAP PRODUKTIF (RUBEN MAGAI)

- 1. PERLU ADANYA SINKRONISASI ANTAR HTCK ANTAR PENGEMBAN/PENGELOLA DANA OTSUS.
- 2. BP3OKP DAPAT MELAPORKAN APABILA PEMDA PROV/KAB TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI AMANAT ATURAN HUKUM.

- 1. SELAMA 2 TAHUN BERTUGAS ANTARA BP3OKP DAN PEMDA PROV/KAB/KOTA TIDAK SINKRON MULAI DARI REN S/D PENGAWASAN DANA DAN PROGRAM PROGRAM OTSUS, LAPORAN TRIWULAN KEPADA BP3OKP SEHARUSNYA DILAPORKAN, SERTA DAMPAKNYA DAYA SERAP RENDAH.
- 2. MUSRENBANG OTSUS TIDAK DILIBATKAN.

Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Kolaborasi Anggota BPP dan Ketua MRP



- Rapat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara anggota BPP dan Ketua MRP membahas pengawasan Otsus. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan dana Otsus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Papua melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan lokal.
- **Fokus Utama Rapat Koordinasi**
- **Penguatan Pengawasan Dana Otsus:** Mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana Otsus Papua.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan tata kelola dana Otsus yang transparan dan akuntabel agar tepat sasaran.
- **Keterlibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam pengawasan untuk memastikan dana Otsus sesuai dengan kebutuhan lokal.
- **Rekomendasi Strategis**
- **Sinkronisasi Regulasi:** Menyelaraskan peraturan menteri keuangan, peraturan menteri dalam negeri, dan peraturan daerah khusus.
- **Simplifikasi Prosedur:** Memangkas tahapan dan syarat administrasi yang tidak efektif.
- **Fokus pada Indikator Kinerja:** Mengutamakan kegiatan berdasarkan indikator kinerja Otsus, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
- **Pentingnya Harmonisasi dan Transparansi**
- **Harmonisasi Pusat dan Daerah:** Yosep Yolmen Yanowo menekankan pentingnya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Otsus.
- **Transparansi Kegiatan:** Irene Manibuy menyoroti perlunya transparansi dalam semua kegiatan Otsus agar mudah diawasi.
- Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan pengelolaan dana Otsus dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, mewujudkan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.

Pokja Papua Cerdas Melakukan Rapat SHEK bersama SMK N 1 di Skretariat BPP selasa, 13 Oktober 2025



BP3OKP Pokja Papua Tengah menerima kunjungan kerja dari SMKN 1 Agribisnis dan Agroteknologi Nabire-papua tengah membahas beberapa hal :

1. Pengawasan Progres Kegiatan Revitalisasi SMK. Bnatuan Direktorat SMK yang difasilitasi BP3OKP Papua Tengah sebanyak 4 ruangan
2. Menyampaikan Aspira dan dukungan atas inisiatif Pemda Papua Tengah yang merencanakan SMKN1 Nabire dirarik.kewenangan ke provinsi dgn merubah nomenklator sekolah menjadi sekolah Negeri Khusus Agribisnis dan agroteknologi Papua tengah di Nabire
3. Menyampaikan aspirasi dan dukungan usulan rencana revisi PP 106 terkait pengalihan kewenangan pengelolaan Pendidikan menengah (SMA/SMK) ke.provinsi tahun 2026 oleh Kemendagri

Anggota BPP

Menghadiri undangan penghormatan kepada Anggota DPRP yang meninggal bersama beberapa pejabat daerah lainnya.



Kami merasa sangat sedih atas kehilangan yang tak tergantikan ini. Semoga almarhum menemukan kedamaian dan kebahagiaan di sisi tuhan. Kami juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi masa-masa sulit ini.

16 Oktober 2025

Rapat Koordinasi, Sinkronisasi Dan Kolaborasi Bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi



Point Pertemuan BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah antara lain:

Progres kesiapan 4 syarat utama Pembangunan Rumah Sakit Rujukan untuk pengajuan Alokasi Dana Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Papua Tengah al :

Kajian Ilmiah Pembangunan Rumah Sakit sudah ada

AMDAL Rumah Sakit sedang dilakukan Analis

Design Lokasi Rumah Sakit sudah ada

IKP (Insiden Keselamatan Pasien) menerapkan Standar Keselamatan Pasien akan menyesuaikan dengan tata letak lokasi dan design Rumah Sakit.

Tindak lanjut : Bila syarat utama sudah selesai tahun 2025 maka tahun 2026 akan masuk pengusulan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Papua Tengah.

Komplait Masyarakat terhadap kekurangan obat dan air bersih yang sering terjadi di Rumah Rumah Sakit Siritwi selama beberapa tahun terakhir sampai awal tahun, maka dengan persoalan itu. Gubernur Provinsi Papua Tengah sudah mengambil alih sementara menjadi Rumah Sakit rujukan Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, mealui Dinas kesehatan Provinsi sudah lebih fokus memperhatikan persediaan obat, Bahan medis habis pakai dan alat-alat medis termasuk klaim BPJS, sudah menjelang lebih dari 6 bulan sehingga pelayanan sudah membaik dan komplait terhadap pelayanan sudah tidak ada lagi.

Penjelasan pertemuan kepala Dinas Kesehatan dan Mahasiswa kedokteran terkait kejelasan status (ReNIM, KOAS, Uji Kompetensi) sekaligus mendata masing-masing mahasiswa kedokteran untuk bantuan beasiswa kepada mahasiwa kedokteran di Jayapura di awal bulan juni 2025.

Point Pertemuan BP3OKP Pokja Papua Sehat dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah yang diwakilkan oleh bidang Layanan dan Pendataan antara lain :

Tindak lanjut dari pertemuan lalu terkait bantuan beasiswa kepada mahasiwa kedokteran bahwa akan dialihkan melalui Dinas pendidikan dan akan diakomodir dalam Anggaran Perubahan.

Sesuai penjelasan melalui bidang layanan dan pendataan bahwa di sidang Anggaran Perubahan tidak diakomodir karena terjadi defisit anggaran.

Tindak Lanjut : Mohon akomodir tahun depan bila anggaran memungkinkan atau bila tidak terjadi defisit anggaran.

Rapat SHEK Anggota BPP, Pokja Papua Produktif bersama PT.PLN UPT Nabire, Rabu, 15 Oktober 2025

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua melalui program Papua Produktif, BP3OKP Provinsi Papua Tengah melakukan audiensi dan koordinasi dengan General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Papua. Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki kerja sama strategis dalam penyediaan akses listrik di wilayah prioritas dan mendukung kegiatan ekonomi lokal.

I. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Pemetaan Wilayah Prioritas
 - Identifikasi kampung dan daerah yang belum teraliri listrik namun memiliki potensi ekonomi lokal.
2. Integrasi Program Papua Produktif
 - Sinergi antara program Papua Produktif dan rencana elektrifikasi PLN untuk mendukung UMKM dan kegiatan produktif masyarakat.
3. Kebutuhan Infrastruktur dan Dukungan Teknis
 - Diskusi mengenai kebutuhan jaringan distribusi, gardu, dan pelibatan tenaga kerja lokal.
4. Skema Kerja Sama dan Tindak Lanjut
 - Pembentukan tim koordinasi bersama dan penyusunan nota kesepahaman (MoU).

II. HASIL DAN KESEPAKATAN

- PT PLN menyambut baik inisiatif BP3OKP dan akan melakukan kajian teknis terhadap wilayah yang diusulkan.
- Disepakati pembentukan Tim Koordinasi Bersama untuk menyusun rencana kerja dan pemetaan lokasi prioritas.
- BP3OKP akan menyampaikan proposal resmi beserta data pendukung (lokasi, jumlah KK, potensi ekonomi).
- Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan untuk finalisasi rencana kerja dan penandatanganan MoU.

III. TINDAK LANJUT

- BP3OKP:
 - Menyusun dan mengirimkan proposal serta dokumentasi pendukung.
- PT PLN (Persero):
 - Melakukan kajian teknis dan menyusun draft kerja sama.
- Kedua Pihak:
 - Menyiapkan MoU dan rencana implementasi tahap awal di wilayah prioritas.



Pokja papua produktif dan polhukam menghadiri Sosialisasi Implementasi Dashboard Papeda TKD Papua bersama BP3OKP

- Sosialisasi Implementasi Dashboard Papeda TKD Papua bersama BP3OKP kemungkinan besar membahas beberapa poin penting terkait dengan pengelolaan dan transparansi dana otonomi khusus (Otsus) di Papua. Berikut adalah rinciannya:
 - **Tujuan Dashboard Papeda TKD:**
 - **Transparansi:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana Otsus.
 - **Akuntabilitas:** Memastikan akuntabilitas penggunaan dana Otsus kepada publik dan pemangku kepentingan.
 - **Efektivitas:** Memantau efektivitas program dan kegiatan yang didanai oleh dana Otsus.
 - **Evaluasi:** Memfasilitasi evaluasi dampak dana Otsus terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
 - **Fitur dan Fungsi Dashboard:**
 - **Data Anggaran:** Informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran dana Otsus.
 - **Program dan Kegiatan:** Rincian program dan kegiatan yang didanai oleh dana Otsus.
 - **Realisasi Fisik:** Data mengenai progres pelaksanaan fisik program dan kegiatan.
 - **Penerima Manfaat:** Informasi mengenai penerima manfaat dari program dan kegiatan.
 - **Indikator Kinerja:** Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan.
 - **Laporan:** Generasi laporan otomatis untuk memudahkan pelaporan dan analisis.
 - **Manfaat Dashboard bagi Pemangku Kepentingan:**
 - **BP3OKP:** Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Otsus.
 - **Pemerintah Daerah:** Mengelola dan melaporkan penggunaan dana Otsus secara transparan.
 - **Masyarakat:** Mengakses informasi mengenai penggunaan dana Otsus dan memberikan masukan.
 - **Aparat Pengawas:** Memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus.



Rapat 6 anggota BPP dan komite PPP di Jakarta tanggal 16 Oktober 2025

- **Koordinasi Program Pembangunan:** Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Papua, memastikan tidak ada tumpang tindih dan semua berjalan sesuai rencana.
- **Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus:** Mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
- **Sinkronisasi Kebijakan:** Memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah selaras dengan tujuan percepatan pembangunan di Papua.
- **Agenda yang Dibahas**
 - **Evaluasi Program yang Sedang Berjalan:** Meninjau kemajuan program-program pembangunan yang sedang berjalan, mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi untuk mempercepat penyelesaiannya.
 - **Perencanaan Program Baru:** Merencanakan program-program pembangunan baru yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
 - **Anggaran dan Pendanaan:** Membahas masalah anggaran dan pendanaan program-program pembangunan, serta mencari sumber-sumber pendanaan alternatif untuk mempercepat pembangunan di Papua.
 - **Koordinasi Antar Lembaga:** Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam pembangunan di Papua, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga non-pemerintah.
- **Hasil yang Diharapkan**
 - **Percepatan Pembangunan:** Mempercepat pembangunan di Papua, terutama di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
 - **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
 - **Penyelesaian Masalah:** Menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat pembangunan di Papua, seperti masalah tanah, masalah keamanan, dan masalah sosial budaya.
- **Badan Pengarah Papua (BPP)**
 - BPP memiliki peran kunci dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan percepatan pembangunan di Papua. BPP bertugas untuk:
 - Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
 - Memberikan arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua.
 - Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
 - Dengan adanya rapat koordinasi antara KP3 dan BPP, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Papua.



Rapat sinkronisasi bersama kanwil DJPB papua dan KPPN nabire 29 oktober 2025

Maksud dan tujuan:

Mengsinkronkan perbedaan pemahaman antara dua pihak,

Hasil yang dicapai:

Tersinkronnya pemahaman BP3OKP dan kanwil djpb papua



Rapat koordinasi dan pendampingan program prioritas kemendikdasmen bersama pemda provinsi papua tengah tahun 2025, 30 Oktober 2025

Pembahasan (hasil)

- pengadaan samrtboasrd
- keamanan, jaringan internet di daerah 3T
- pengadaan samrtboasrd
- revitalisasi satuan pendidikan
- peningkatan kualifikasi akademik (percepatan PPG tahap pertama sebanyak 510 guru)
- implementasi permendikdasmen No 44 Tahun 2024 (percepatan PPG di daerah 3T sebanyak 500 Guru daerah)
- pendidika profesi guru PPG (percepatan Kualifikasi guru)
- transparansi tunjangan (tenaga mapega Guru Daerah 3T)
- percepatan guru P3K (revilitasi klose pendidikan guru (KPG) khas papua sebagai pusat penyiapan calon.
- balai latihan dan pelestarian budaya papua, (perluasan akses pendidikan dan penguatan bahasa.



BP3OKP bersama Gubernur papua tengah membuka acara



Rapat tersebut diwakilakn pokja papua cerdas



Terima kasih